

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH**NOMOR : 15 Tahun 2012****TANGGAL : 26 Desember 2012****KABUPATEN JEMBRANA****RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013****Urusan Pemerintahan** : 1.20 - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan**Organisasi** : 1.20.03 - SEKRETARIAT DAERAH**Unit Kerja** : PPKD

Halaman : 1

Kode Rekening						Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1						2	3	4
1.20	1.20.03	00	00	4		PENDAPATAN DAERAH	638.997.050.566,58	
1.20	1.20.03	00	00	4	2	Dana Perimbangan	511.597.003.353,20	
1.20	1.20.03	00	00	4	2 1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	15.274.007.353,20	
1.20	1.20.03	00	00	4	2 2	Dana alokasi umum	450.919.726.000,00	Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nomor, S-831/PK/2012, tanggal 24 Oktober 2012, perihal Pemberitahuan Alokasi DAU dan DAK TA. 2012
1.20	1.20.03	00	00	4	2 3	Dana alokasi khusus	45.403.270.000,00	Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Nomor, S-831/PK/2012, tanggal 24 Oktober 2012, perihal Pemberitahuan Alokasi DAU dan DAK TA. 2012
1.20	1.20.03	00	00	4	3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	127.400.047.213,38	
1.20	1.20.03	00	00	4	3 3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	72.868.021.213,38	- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 16 Nopember 2012, perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota TA. 2013
1.20	1.20.03	00	00	4	3 4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	51.680.144.000,00	- Surat Sekr
1.20	1.20.03	00	00	4	3 5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2.851.882.000,00	- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bali, tanggal 16 Nopember 2012,

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1							2	3	4
									perihal Pagu Sementara Bagi Hasil Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/ Kota TA. 2013 - Surat Sekr
							JUMLAH PENDAPATAN	638.997.050.566,58	
1.20	1.20.03	00	00	5			BELANJA DAERAH	61.547.433.735,93	
							Belanja Tidak Langsung	61.547.433.735,93	
1.20	1.20.03	00	00	5	1	4	Belanja hibah	12.410.654.174,17	
1.20	1.20.03	00	00	5	1	5	Belanja bantuan sosial	3.410.000.000,00	
1.20	1.20.03	00	00	5	1	6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	7.843.126.799,34	
1.20	1.20.03	00	00	5	1	7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota, pemerintahan desa dan partai politik	37.383.652.762,42	
1.20	1.20.03	00	00	5	1	8	Belanja tidak terduga	500.000.000,00	
							Belanja Langsung		
							JUMLAH BELANJA	61.547.433.735,93	
							SURPLUS/ (DEFISIT)	577.449.616.830,65	
1.20	1.20.03	00	00	6	1		Penerimaan Pembiayaan Daerah	35.679.791.456,00	
1.20	1.20.03	00	00	6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	29.482.791.456,00	
1.20	1.20.03	00	00	6	1	7	Penerimaan Dana Talangan	5.200.000.000,00	
1.20	1.20.03	00	00	6	1	8	Dana Bergulir	997.000.000,00	
							JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.679.791.456,00	

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp.)	DASAR HUKUM
1							2	3	4
1.20	1.20.03	00	00	6	2		Pengeluaran Pembiayaan Daerah	9.397.000.000,00	
1.20	1.20.03	00	00	6	2	2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000.000,00	
1.20	1.20.03	00	00	6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah Dana Bergulir	997.000.000,00	
1.20	1.20.03	00	00	6	2	5	Pengeluaran Dana Talangan	5.200.000.000,00	
							JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.397.000.000,00	
							PEMBIAYAAN NETTO	26.282.791.456,00	